

# **PENGARUH EMIR SHEIKH TAMIM DI BALIK KEBIJAKAN PEMERINTAH QATAR MERESTORASI PENUH HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN IRAN TAHUN 2017**

Achmad Romadon Mubarak  
Departemen Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga  
E-mail: romadonmubarak@gmail.com

*Emir Sheikh Tamim sebagai pemimpin tertinggi di Qatar mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri, terutama perannya dalam menentukan arah hubungan diplomatik dengan sejumlah negara tetangga Qatar. Sejak berkuasa pada tahun 2013, di bawah kepemimpinan Emir Sheikh Tamim, Qatar mengalami dua kali krisis diplomatik dengan sejumlah negara Gulf Cooperation Council (GCC) yaitu Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA). Pada krisis pertama 2014 berhasil kembali normal, tetapi tidak demikian pada krisis kedua tahun 2017 yang memberlakukan blokade ekonomi atas Qatar. Untuk memperbaikinya, Arab Saudi menawarkan 13 permintaan damai, tetapi ditolak oleh Qatar yang lebih menjalin hubungan erat dengan Iran. Berdasarkan analisis kebijakan luar negeri yang menggunakan pendekatan idiosinkratik, teori persepsi dan teori pilihan rasional yang menekankan signifikansi pengaruh dari Emir Sheikh Tamim, diperoleh temuan` bahwa terdapat dua alasan Pemerintah Qatar merestorasi penuh hubungan dengan Iran. Pertama, adanya persepsi Emir Sheikh Tamim yang melihat fenomena krisis 2017 sebagai bentuk pengekanan terhadap kedaulatan negara. Kedua, kebijakan restorasi penuh dengan Iran merupakan pilihan rasional dalam rangka menyelamatkan kondisi perekonomian nasional dan mempertahankan independensi kebijakan luar negerinya terhadap pengaruh Arab Saudi. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada dua hal yakni persepsi Emir Sheikh Tamim dan pilihan rasional, yang mana kedua hal ini memiliki korelasi membentuk kebijakan luar negeri Qatar.*

**Kata-kata Kunci: Krisis Diplomatik Gulf Cooperation Council (GCC), Emir Sheikh Tamim, Iran, persepsi, pilihan rasional.**

## **Pendahuluan**

Pasca Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani resmi dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi Qatar pada bulan Juni 2013, Qatar mengalami dua kali krisis diplomatik dengan negara tetangganya, yaitu pada tahun 2014 dan 2017. Pada krisis diplomatik pertama yang terjadi pada 5 Maret 2014, sejumlah negara GCC yang terdiri dari Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Ketiga negara tersebut sepakat menarik pulang duta besarnya yang sedang bertugas di Doha, Qatar. Krisis diplomatik GCC tahun 2014 memang tidak berdampak pada aktivitas perekonomian Qatar, untuk itu Pemerintah Qatar tetap memperkuat kerjasama ekonomi Qatar dengan beberapa negara di Teluk. Upaya ini dilakukan guna menunjang kebutuhan sehari-hari bagi kurang

lebih 2,5 juta penduduknya dan menjaga stabilitas ekonomi Qatar yang dikenal memiliki reputasi pencapaian yang baik. Arab Saudi dan UEA telah memasok 80 persen kebutuhan pangan ke Qatar setiap tahunnya sekaligus menjadi mitra dagang utamanya di kawasan Teluk (Hassan, 2015).

Selain Arab Saudi dan UEA, negara Bahrain turut berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan serta proses distribusi ekspor-impor Qatar yang nilainya mencapai miliaran dollar Amerika Serikat (US\$) tiap tahunnya. Sebagian besar aktivitas ekspor-impor Qatar dilakukan melalui pelabuhan dan Gerbang Salwa, yang merupakan satu-satunya pintu perbatasan yang menghubungkan wilayah Qatar dan Arab Saudi. Berdasarkan tahun 2015 menurut laporan data dari World Integrated Trade Solutions (tt.) tercatat Qatar mengimpor produk pangan dari UEA senilai US\$ 160,6 juta, sementara impor yang sama dari Arab Saudi mencapai US\$ 148,5 juta. Sementara pada tahun 2016, nilai impor produk pangan dari UEA mengalami kenaikan yakni sebesar US\$ 180,5 juta, dan nilai impor produk pangan dari Arab Saudi turun tipis menjadi US\$ 140,7 juta. Terkait nilai ekspor, pada tahun 2015 negara UEA mendominasi tujuan utama pasar ekspor Qatar di kawasan Teluk dengan total nilai mencapai US\$ 4,7 miliar, selanjutnya diikuti Arab Saudi senilai US\$ 896,6 juta dan Bahrain senilai US\$ 227,1 juta. Untuk tahun 2016, Qatar telah mengekspor produknya ke UEA senilai US\$ 3,75 miliar, Arab Saudi senilai US\$ 519,2 juta dan Bahrain senilai US\$ 214 juta.

Hubungan bilateral yang baik antara Qatar dengan sejumlah negara GCC sebagaimana ditunjukkan pada data World Integrated Trade di atas pasca krisis 2014 tidak bertahan lama. Pada pertengahan tahun 2017, hubungan diplomatik Qatar dengan sejumlah negara GCC kembali memburuk yang kedua kalinya di bawah pemerintahan Emir Sheikh Tamim. Arab Saudi, Bahrain dan UEA secara resmi mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar per 5 Juni 2017. Ketiga negara tersebut menyampaikan beberapa kebijakan restriktif yang ditujukan bagi Qatar, antara lain: (1) Arab Saudi, Bahrain dan UEA memberi waktu 48 jam kepada para diplomatnya untuk meninggalkan Qatar, serta mengusir duta besar Qatar yang bertugas di wilayahnya; (2) maskapai penerbangan asal UEA yakni Etihad Airways, Emirates dan FlyDubai dilarang beroperasi dari dan menuju Doha per 6 Juni 2017; (3) Arab Saudi, Bahrain dan UEA juga menutup wilayah udara mereka untuk maskapai penerbangan Qatar Airways; menutup Gerbang Salwa; dan melarang kapal berbendera Qatar singgah di perairannya; serta (4) mengeluarkan Qatar dari koalisi militer negara-negara Arab dalam operasi memerangi pemberontak Yaman di Houthi (BBC Indonesia, 2017).

Beragam upaya telah dicoba oleh sejumlah negara GCC terhadap Qatar untuk mengkhiri krisis diplomatik. Pada 22 Juni 2017, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kuwait menyampaikan 13 tuntutan yang harus dipenuhi oleh Qatar, agar hubungan diplomatik kembali normal. Salah satu isinya menyebutkan larangan bagi Pemerintah Qatar untuk menjalin hubungan dekat dengan Iran. Menanggapi tawaran damai tersebut, pada 1 Juli 2017, Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan penolakan untuk memenuhi 13 tuntutan damai dari Arab Saudi (Pullella dalam Reuters, 2017). Satu bulan kemudian, Pemerintah Qatar mengambil keputusan yang kontras dengan tuntutan sejumlah negara GCC. Pemerintah Qatar secara resmi mengumumkan untuk merestorasi penuh hubungan diplomatik dengan Iran per 23 Agustus 2017. Pengumuman itu disampaikan melalui *website* Kementerian Luar Negeri Iran, yang berisikan penempatan tugas kembali duta besar Qatar untuk Iran di Teheran (Ministry of Foreign Affairs of Qatar, 2017). Pemerintah Qatar juga menyampaikan keinginannya untuk memperkuat hubungan dengan Iran.

Keputusan merestorasi penuh hubungan diplomatik dengan Iran, sekaligus menandai normalnya hubungan politik Qatar-Iran yang sebelumnya merenggang sejak 6 Januari 2016 pasca insiden penyerangan terhadap kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran dan Konsulat Jenderal Arab Saudi di Mashhad. Atas peristiwa ini, Qatar memutuskan untuk menarik pulang duta besarnya di Teheran (Toumi dalam Gulf News, 2017). Menyusul kebijakan luar negeri Qatar tersebut, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani angkat suara merespon tekanan rezim Arab Saudi dan sejumlah negara lain. Secara tegas, Emir Sheikh Tamim menyampaikan penolakan kerasnya terhadap tekanan sejumlah negara GCC yang menurutnya menyangkut intervensi kedaulatan Qatar (Al Jazeera, 2017). Pernyataan Sheikh Tamim mempertegas kembali sikap penolakan Pemerintah Qatar atas segala bentuk tekanan yang mengganggu kedaulatan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat adanya hal yang menarik di balik kebijakan Pemerintah Qatar merestorasi penuh hubungan dengan Iran. Krisis diplomatik GCC tahun 2017 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah hubungan politik Qatar dengan negara-negara di kawasan Teluk. Pemberlakuan blokade ekonomi oleh sejumlah negara GCC menyebabkan Qatar terancam krisis pangan. Arab Saudi, Bahrain dan UEA yang merupakan negara terdekat dan negara mitra dagang utama di kawasan bagi Qatar, tidak menyurutkan Pemerintah Qatar untuk bertindak lebih keras pasca penyampaian 13 tuntutan oleh Arab Saudi. Qatar menunjukkan perlawanan terhadap Arab Saudi dan sekutunya, lewat kebijakan merestorasi penuh hubungan diplomatik Qatar-Iran di tengah krisis diplomatik yang masih

berlangsung. Sikap Qatar tidak terlepas dari pengaruh kuat dari sosok Emir Sheikh Tamim sebagai pemimpin tertinggi di Qatar. Maka, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh Emir Sheikh Tamim di balik kebijakan luar negeri Qatar.

### **Implikasi Krisis Diplomatik Gulf Cooperation Council 2017 Terhadap Qatar**

Hubungan diplomatik antara negara-negara GCC dengan Qatar mulai merenggang sejak pemberitaan media Arab Saudi dan UEA pada tanggal 24 Mei 2017, menuduh Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyampaikan pidato yang dianggap berpotensi menyebabkan destabilisasi kawasan. Isi cuplikan pidato Emir Qatar menyatakan bahwa, “Iran mewakili kekuatan regional dan Islam yang tidak dapat diabaikan dan tidak bijaksana untuk melawannya. Ia (Iran merupakan kekuatan dalam stabilisasi kawasan (Teluk) ini”, (Policy Analisis Unit, 2017) Namun, pernyataan tersebut telah dibantah oleh pemerintah Qatar, dan menganggapnya sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Menyusul pemutusan hubungan diplomatik, Arab Saudi, Bahrain dan UEA sepakat untuk menerapkan kebijakan blokade terhadap Qatar. Ketiga negara menutup wilayah perbatasan dan jalur transportasi yang menghubungkan negaranya dengan Qatar.

Pada 20 Juni 2018, Pemerintah Arab Saudi berencana memisahkan daratan Qatar dengan wilayahnya secara permanen dengan cara menggali kanal di antara perbatasan darat Qatar dan Arab Saudi (Tempo, tt). Publikasi jurnal ekonomi Coface Economic Publications (2017) menyebutkan dampak utama dari krisis yang dialami Qatar dapat dirasakan pada sektor konstruksi, perdagangan ritel dan sektor transportasi. Embargo telah mengganggu kegiatan impor Qatar, yang mengakibatkan Qatar juga mengalami kekurangan bahan konstruksi tertentu dan menyebabkan keterlambatan dalam beberapa proyek. Salah satu proyek besar pemerintah Qatar saat ini ialah pembangunan infrastruktur jelang penyelenggaraan *event* bertaraf internasional, Piala Dunia 2022. Pada bulan Juli 2017, dilaporkan kegiatan impor Qatar menurun sebesar 35 persen (Coface Publication Embargo, 2017).

Pada sektor pariwisata, mayoritas wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Qatar berasal dari negara-negara Teluk. Dampak blokade ekonomi menyebabkan terjadi penurunan cukup signifikan sebesar 40 persen dari total keseluruhan kunjungan wisman. Secara kalkulasi kerugian ekonomi, imbas *travel restrictions* oleh sejumlah negara GCC, Qatar diperkirakan mengalami penyusutan pendapatan sebesar 11,8 persen di tahun 2017 (Qatar Tourism Report, 2017). Untuk sektor penerbangan komersil, penutupan wilayah udara di beberapa negara Teluk berdampak pada operasionalisasi maskapai Qatar yang memiliki

jadwal 50 penerbangan setiap hari, setara dengan 18 persen dari total kapasitas kursi secara global. Pelemahan performa perekonomian Qatar turut menimpa sektor konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2016, sektor ini mengalami kenaikan sebanyak 6 persen, akan tetapi mengalami penurunan 3 persen di tahun 2017 (Qatar Country Report, 2017). Secara keseluruhan, harga konsumen pada bulan Agustus 2017 turun 0,4 persen. Salah satu upaya untuk mengatasi blokade ekonomi bagi Qatar ialah menjalin hubungan dagang untuk mengalihkan pasar impor yang semula bergantung pada sejumlah negara GCC yang tengah berselisih. Kendati demikian, Qatar akan dihadapkan pada penambahan biaya impor yang lebih tinggi, seperti Qatar menerapkan tarif *ad valorem* sebesar 5 persen pada ongkos, asuransi dan pengiriman (Coface Publication Embargo, 2017).

Sejak krisis diplomatik tahun 2017, pergerakan Qatar dibatasi oleh ragam bentuk tekanan yang diberikan oleh Arab Saudi, Bahrain hingga UEA. Tekanan berupa blokade ekonomi di atas berdampak besar pada pasokan bahan pangan, kebutuhan infrastruktur jelang persiapan Piala Dunia 2022 hingga kegiatan operasional maskapai penerbangan Qatar Airways. Isolasi yang dialami Qatar merupakan bentuk baru dari sanksi kolektif oleh sejumlah negara GCC. Pada krisis diplomatik tahun 2014, dengan dugaan yang sama, Qatar tidak sampai mengalami sanksi yang sifatnya membatasi aktivitasnya. Dari perubahan aspek pemberian sanksi, terungkap adanya model kebijakan baru yang sebagian besar diinisiasi oleh pemerintah Arab Saudi dalam krisis diplomatik kali ini. Dari sekian banyaknya tekanan dan ancaman yang ditujukan kepada Qatar, Pemerintah Qatar di bawah komando Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memutuskan untuk merestorasi penuh hubungan diplomatik dengan Iran, tidak lama pasca pengumuman pemutusan hubungan diplomatik pada awal Juni 2017.

### **Persepsi Emir Sheikh Tamim dan Keengganan Pemerintah Qatar Mengintensifkan Diri Untuk Memperbaiki Hubungan Diplomatik dengan Sejumlah Negara GCC**

Perspektif dari para pembuat kebijakan dan interpretasi atas situasi yang terjadi pada lingkungan sekitar memberikan kontribusi signifikan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Terutama dalam suatu negara yang menganut sistem autokrasi, pusat perhatian para pemerhati kebijakan luar negeri terfokus pada peranan seorang raja. Peranan seorang raja dalam negara monarki tidak menutup kemungkinan memiliki posisi dan pengaruh kuat pada proses pengambilan keputusan. Mingst (1999) berpendapat, pengaruh interpretasi lingkungan dan persepsi sangat krusial dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemimpin. Persepsi ini akan membentuk gambaran dari pemahaman tentang lingkungan sekitar, yang kemudian

memberikan kontribusi terhadap pembuatan kebijakan luar negeri (Scachter, 2011). Dari daftar 13 tuntutan yang disampaikan oleh Kuwait kepada Qatar, Arab Saudi dan sekutunya menuntut 2 poin utama yang paling penting. Pertama, menghentikan keterlibatan dan pemberian dukungan Qatar kepada kelompok teroris dan oposisi politik. Kedua, mengurangi intensitas hubungan diplomatik dengan Iran.

Di awal pemutusan hubungan diplomatik, Emir Sheikh Tamim tidak meyakini sepenuhnya alasan Arab Saudi dan sekutunya memutus hubungan diplomatik diakibatkan dukungan Qatar terhadap kelompok teroris. Ia meyakini, fenomena krisis diplomatik kali ini merupakan skenario politik yang sedang dijalankan oleh Arab Saudi dan sekutunya, Bahrain serta UEA. Krisis diplomatik kedua di bawah rezim Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengilustrasikan bahwa adanya model baru penekanan dari sejumlah negara GCC yang dipandang menurutnya sebagai bentuk intervensi urusan luar negeri Qatar. Hal ini disampaikan Emir Sheikh Tamim yang menegaskan penolakannya terhadap ragam bentuk tekanan yang datang dari sejumlah negara GCC, terutama Arab Saudi sebagaimana pernyataannya pada 22 Juli 2017:

“In Qatar, we don’t accept these dictations because we are a country with sovereignty and our decisions are in our own hands and we are not waiting for anyone to tell us what should be done.” (The Peninsula Qatar, 2017).

Penggalan pernyataan tersebut menegaskan pentingnya arti kedaulatan dalam konteks menjalin hubungan diplomatik dengan negara manapun yang selaras dengan kepentingan nasional Qatar, sehingga negara menurut Emir Sheikh Tamim memperoleh kebebasan dalam menentukan sikap maupun tindakan. Menurut Abu Sulaib (2017), elit Qatar pasti membaca situasi demikian, yang mana tiga negara GCC mempunyai prioritas kepentingan yang berbeda. Sementara yang diidentifikasi, Arab Saudi dan Bahrain menganggap Iran sebagai prioritas. Sedangkan UEA lebih memfokuskan diri pada kelompok Ikhwanul Muslimin. Bagi Qatar, merestorasi penuh hubungan diplomatik dengan Iran menunjukkan sikap tegas Pemerintah Qatar terhadap ragam bentuk tekanan untuk memperlemah kedaulatan Qatar. Bantahan mulai dari isu berita hoaks yang tersebar di media *online* Arab Saudi soal pujian Emir Sheikh Tamim kepada Pemerintah Iran, berlanjut ke pemberian dukungan terhadap kelompok teroris, tidak direspon baik oleh elit Arab Saudi dan sekutunya.

Keinginan Arab Saudi dan sekutunya agar Qatar mengikuti kebijakannya, tetap ditolak oleh Pemerintah Qatar. Dalam sesi wawancara bersama CNBC International pada 30 Oktober

2017, Emir Sheikh Tamim memberi peringatan bahwa “Our sovereignty is a red line. We don’t accept anybody interfering our sovereignty,” (Al Jazeera, 2017). Pernyataan Emir Sheikh Tamim menyiratkan bahwa selain tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Qatar pasca diblokade, masalah terbesar sebenarnya datang dari upaya intervensi kedaulatan yang sedang dilakukan oleh kekuatan asing. Penggunaan istilah *red line* oleh emir untuk menggambarkan kondisi kedaulatan Qatar yang berada di ambang berbahaya, sebuah peringatan serius bagi urusan domestik dan hubungan internasional. Istilah tersebut sekaligus menyimbolkan sikap resistensi Pemerintah Qatar yang tetap tidak menerima segala bentuk pelemahan kedaulatan dari kekuatan manapun, sesuai sumpah jabatan dan konstitusi, sekalipun mendapat ancaman dari Arab Saudi.

“We want it (the crisis) to end. But nothing is going to be above our dignity, our sovereignty”, imbuh Emir Sheikh Tamim (Al Jazeera, 2017). Pernyataan tersebut menunjukkan Emir Sheikh Tamim merupakan pribadi yang memegang teguh nilai dan berkomitmen terhadap integritas Qatar sebagai negara yang berdaulat. Langkah awal Emir Sheikh Tamim menginginkan sebuah dialog, akan tetapi kesepakatan dalam dialog berakhir ketika Emir Sheikh Tamim menolak untuk mengkomersilkan kedaulatannya demi kepentingan negara lain. Kedaulatan adalah segalanya, sekalipun Qatar merupakan negara kecil, Emir Sheikh Tamim yang berlatarbelakang militer, paham bahwa Qatar sulit berada di situasi konflik terbuka melawan Arab Saudi dan sekutunya. Keputusan untuk menolak 13 tawaran damai Arab Saudi dan memilih untuk mendekati Iran ialah representasi dari bentuk perlawanan Qatar, tanpa harus mengekang kedaulatannya.

Sejak tahun 1995, Qatar memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dari negara tetangganya di semenanjung Teluk. Pada waktu itu, Qatar tengah berusaha melepaskan diri dari pengaruh Arab Saudi yang berlebihan, namun dihadapkan dengan tantangan ketidaksetujuan Arab Saudi melihat peningkatan aktivitas politik Qatar. Sehingga, independensi kebijakan luar negeri Qatar pada waktu itu dipertanyakan. Dalam fenomena Krisis Diplomatik GCC tahun 2017, Emir Sheikh Tamim melihat adanya sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh negara tetangganya. Sesuatu yang tidak biasa dimunculkan oleh Arab Saudi dan sekutunya dengan menyusun skenario politik yang mengindikasikan upaya pencapaian tertentu. Arab Saudi dan sekutu berupaya mengambil kesempatan untuk melemahkan Qatar yang ambisius (Sulaib, 2017). Skenario tersebut diterapkan berupa tuduhan awal yang dimulai pada akhir bulan Mei 2017, hingga puncak pemutusan hubungan

diplomasi pada 5 Juni 2017 yang merupakan sebuah fenomena yang belum pernah dialami oleh Qatar.

Hal yang menarik, terdapat keterlibatan dua tokoh muda yang berperan penting di balik keputusan sejumlah negara GCC memutuskan hubungan diplomasi dengan Qatar, menjadi fokus utama Emir Sheikh Tamim melihat ada kompetisi politik untuk menjadi penguasa Semenanjung Teluk. Dua tokoh muda yakni Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) dan Putra Mahkota UEA Mohammed Bin Zayed. Kedua tokoh muda ini dikenal tegas dan visioner, yang tengah berupaya membangun negaranya menjadi kekuatan regional. Cinzia Bianco (2017) berpendapat bahwa kedua putra mahkota sama-sama memperjuangkan aspirasi politik domestik negaranya untuk menjadi hegemoni di regional. Namun, aspirasi mereka terhalang oleh kehadiran pemimpin muda Qatar Emir Sheikh Tamim yang mana berkomitmen melanjutkan visi ayahnya yang bertolak belakang dengan kepentingan Arab Saudi, yakni: menjadi sebuah negara kecil yang berpengaruh di tingkat regional dan internasional; menjauhi pengaruh Arab Saudi; serta dekat dengan kelompok-kelompok oposisi yang di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang mana merupakan isu yang paling sensitif bagi Arab Saudi.

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Emir Sheikh Tamim yang melihat adanya upaya Arab Saudi dan sekutunya ingin menumbangkan kekuasaannya,

“It was ‘obvious’ that the Saudi-led quartet is trying to force a change of leadership in Qatar. History as well tells us, teaches us, they tried to do that before, in 1996 after my father became the Emir. So, and they made it also so obvious in the last couple of weeks.” (The Strait Times, 2017).

Emir Sheikh Tamim mengulangi kata *obvious* sebanyak dua kali sebagai bentuk penekanan atas elit sejumlah negara GCC yang memusuhinya, secara jelas menginginkan Qatar kembali seperti pada masa Sheikh Khalifa. Artinya, negara-negara tersebut terus berupaya menekan Qatar sampai pada akhirnya elit Qatar menyerah dan tunduk terhadap kebijakannya. Sebagai sosok yang dikenal sangat tertarik pada sejarah peradaban negara, Emir Sheikh Tamim memahami betul ketika ayahnya, Sheikh Hamad mengkuudeta Sheikh Khalifa pada tahun 1996 menimbulkan ketidaksenangan dari Arab Saudi yang selama kepemimpinan Sheikh Khalifa memberikan keuntungan politik baginya.

Pada sesi wawancara, Emir Sheikh Tamim menerangkan bahwa Arab Saudi dan sekutunya tidak menyukai pencapaian Qatar dan pengaruh Qatar terhadap kawasan selama ini, “They



don't like our independence, the way how we are thinking, our vision for the region," (The Strait Times, 2017). Independensi yang dimaksud ialah kebebasan Qatar sebagai negara berdaulat menjalin hubungan diplomatik dengan negara manapun dan menerapkan strateginya, sesuai dengan Pasal 7 dalam Konstitusi Permanen Qatar. Emir Sheikh Tamim juga memandang bahwa apa yang dilakukan oleh sejumlah negara GCC berupa pengepungan atau blokade terhadap Qatar merepresentasikan secara negatif peran yang diinginkan elit-elit negara tersebut. Dalam pidatonya di hadapan perwakilan negara-negara di dunia pada forum Sidang Umum PBB Tahun 2018, Ia menyebut "The siege on Qatar damaged the reputation of the GCC countries, and the paralysis of the Council itself reflected negatively on its desired role." (Ministry of Foreign Affairs of Qatar, 2018). Separuh negara-anggota organisasi GCC terlibat dalam pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar yang berpengaruh terhadap masa depan kerjasama GCC.

Terlepas dari bentuk tekanan yang terus dicoba oleh Arab Saudi dan sekutunya, Emir Sheikh Tamim nyatanya mempunyai perhitungan tersendiri terhadap potensi konflik terbuka antara Qatar dengan sejumlah negara GCC. Kesepakatan kerjasama pertahanan bersama Amerika Serikat (AS), dengan menyediakan wilayah untuk pangkalan militer AS di Al Udeid adalah salah satu keputusan strategis yang pernah diambil oleh pemimpin Qatar. Dengan adanya pangkalan militer AS, penguasa Arab Saudi akan berpikir-ulang dan jelas kehilangan dukungan publik jika menyerang negara tetangga kecilnya, Qatar (Sulaib, 2017). Bahkan tidak menutup kemungkinan Amerika Serikat sebagai sekutu besar Arab Saudi menolak keras terjadinya konfrontasi militer di kawasan Teluk.

Kebijakan pemerintah Qatar merestorasi penuh hubungan diplomatik Iran merupakan salah satu wujud implementasi kebijakan luar negeri Qatar yang independen, sebagaimana telah ditegaskan oleh Emir Sheikh Tamim. Keputusan ini menggarisbawahi keengganan Pemerintah Qatar untuk menerima solusi damai yang mengekang aktivitas politik dan urusan luar negerinya. Tanpa memprioritaskan memperbaiki hubungan diplomatik usai upaya dialog tidak menemui mufakat, Qatar kini memfokuskan diri pada intensifikasi hubungan diplomatik dengan negara non-GCC. Kondisi ini berdasarkan penggunaan teori persepsi, keputusan Pemerintah Qatar telah dipengaruhi oleh sistem keyakinan Emir Sheikh Tamim yang mencakup realitas masa lalu, realitas masa sekarang dan masa depan, serta nilai-nilai yang diyakini. Sebagai seseorang melewati kehidupan di bawah dua rezim pemerintahan yang kontras, membuat Emir Sheikh Tamim memahami bagaimana mengelola negara dengan baik dan lebih independen di tengah konstelasi politik kawasan Teluk yang dinamis ini.

## **Kebijakan Restorasi Penuh Hubungan Diplomatik dengan Iran sebagai Pilihan Rasional**

Berasumsi dari kontribusi dari persepsi Emir Sheikh Tamim yang merujuk pada definisi ‘teman’ dan ‘musuh’, yang mana keduanya menentukan orientasi politik dan ekonomi suatu negara, maka peningkatan hubungan dengan Iran merupakan pilihan rasional Emir Sheikh Tamim yang melihat adanya kepentingan mendesak untuk mencegah instabilitas ekonomi dan bentuk perwujudan kebijakan luar negeri Qatar yang independen. Imbas dari pemberlakuan kebijakan blokade ekonomi oleh sejumlah negara GCC mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ancaman pasokan kebutuhan sehari-hari. Menurut data International Trade Administration (2017), setelah Qatar mengalami lonjakan inflasi sebesar 2,7 persen di tahun 2016, terjadi kenaikan angka inflasi mencapai 0,4 persen tiap bulannya pada 2017. Kenaikan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2017 disebabkan oleh penurunan 40 persen nilai impor Qatar pasca diberlakukan blokade ekonomi. Untuk sektor yang paling terdampak dari kebijakan restriktif ini ialah perdagangan dan perniagaan di jalur darat, laut serta operasionalisasi maskapai penerbangan seperti Qatar Airways.

Sejumlah negara GCC yang terdiri dari Arab Saudi, Bahrain dan UEA merupakan negara yang sangat strategis bagi Qatar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyatnya. diketahui pada tahun 2015 menurut laporan Bank Dunia, Qatar mengimpor bahan pangan senilai US\$ 1,5 miliar yang mana sebagian besar dipasok oleh Arab Saudi dan UEA (Detik Finance, 2017). Krisis diplomatik tahun 2017, menyebabkan Qatar kehilangan pasokan buah-buahan dan sayur-sayuran senilai US\$ 30 juta dari Arab Saudi dan US\$ 65 juta dari UEA (Observatory of Economic Complexity, 2015). Ketika ketiga negara tersebut memutuskan untuk menghentikan pasokan kebutuhan ke Qatar, otomatis berdampak pada stabilitas ekonomi Qatar yang sejauh ini banyak menggantungkan diri pada pasokan kebutuhan sehari-hari sejumlah negara GCC. Selain itu, turut menyebabkan terjadinya naiknya harga sejumlah kebutuhan di pasar domestik, serta secara bersamaan tingkat ketersediaan bahan baku infrastruktur yang semakin menipis. Mengingat saat ini Qatar tengah bersiap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022, yang artinya permintaan kebutuhan bahan konstruksi bangunan cukup tinggi. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Qatar harus mensubstitusi pasar impornya agar dapat menjamin stabilitas kebutuhan dalam negeri beberapa waktu ke depan.

David Snelbecker (1999), menyebutkan bahwa setiap negara membutuhkan keamanan yang konstruktif, dengan cara membangun ekonomi yang kuat di dalam. Kondisi ini memberi artian bahwa negara terkadang bergantung pada kebijakan ekonomi dari ‘musuh’ yang tidak diinginkan, yang kemudian rentan terkena imbas negatif. Untuk mencapai tujuan penguatan ekonomi, Pemerintah Qatar perlu memperhatikan hubungan saling ketergantungan ekonomi dengan negara tetangganya yang sedang menghentikan hubungan dagangnya. Pemerintah Qatar yang memutuskan untuk memperkuat hubungan dengan Iran per 23 Agustus 2017, diambil ketika sedang menghadapi krisis diplomatik. Meskipun dampaknya tidak sebesar Krisis Ekonomi 2008, setidaknya Emir Qatar memahami bahwa fenomena krisis diplomatik kali ini digunakan sebagai momentum yang tepat untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara tetangganya, yakni Iran.

Perbaikan hubungan didasari kepentingan nasional Qatar khususnya di bidang ekonomi. selain itu, aspek geostrategis Iran turut berperan penting. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Comanescu (1999), bahwa tidak hanya lingkungan aman yang membutuhkan ekonomi sehat, akan tetapi kebijakan ekonomi dan pembangunan turut bergantung seberapa aman lingkungan itu, baik secara realitas maupun persepsi. Qatar sejak dilanda krisis diplomatik, membutuhkan penguatan ekonomi dan jaminan stabilitas keamanan, terutama pangan. Persepsi Emir Sheikh Tamim yang menganggap sejumlah negara GCC sedang mencoba untuk menggulingkan kekuasaannya, salah satunya dengan cara memberlakukan kebijakan yang sifatnya membatasi. Lantas kemudian mendorong Pemerintah Qatar harus segera menemukan negara mitra dagang baru yang secara kapabilitas mampu menggantikan peran negara-negara GCC. Kapabilitas yang dimaksud ialah kapabilitas ekonomi dan kapabilitas politik. Kedua kapabilitas tersebut sejatinya berkaitan dengan realitas geopolitik Qatar yang merupakan negara kecil (*small state*) dan berada di kawasan yang dikenal tidak stabil. Artinya, pemulihan hubungan dengan Iran merupakan bentuk cara perlindungan diri (*self-preservation*) untuk menyelamatkan perekonomiannya. Iran dipilih oleh Pemerintah Qatar sebagai bagian dari kebijakan resiliensi ekonominya, untuk mensubstitusi pasar impornya.

Keputusan memilih Qatar untuk mensubstitusi pasar impornya dan mengalihkan rute perdagangan sektor tertentu, relevan dengan istilah ‘Singapore Paradox’ yang dipopulerkan oleh Briguglio (2003). Peneliti kemudian mengaitkan istilah tersebut dengan realitas geopolitik bahwa negara kecil dan memiliki kapabilitas ekonomi yang besar, sangat rentan terhadap guncangan eksternal, terutama bagi negara yang berada di kawasan yang tidak

stabil. Jika diterapkan pada penelitian ini, maka Qatar yang diketahui mempunyai tingkat produk domestik bruto (PDB) per-kapita yang tinggi, akhirnya terkena imbas guncangan eksternal. Negara terdekat Qatar di Semenanjung Teluk kini berubah sikap menjadi kontras, hanya menyisakan Iran yang berbatasan langsung dengan perairan Qatar. Meski memiliki rekam jejak hubungan politik yang dinamis, setidaknya kedua negara tidak pernah bersengketa satu sama lain (Kamrava, 2017).

“Qatar has secured new trade routes, accelerated economic diversification, strengthened its unity and emerged stronger despite the blockade”, ungkap Emir Sheikh Tamim dalam pidatonya pada Munich Security Conference 2018 (Qatar Tribune, 2017). Menemukan rute perdagangan baru dan mengakselerasi diversifikasi ekonomi, merupakan kata kunci yang dapat menggambarkan penerapan strategi resiliensi ekonomi Qatar. Pemerintah Qatar menyadari perlunya adanya strategi resiliensi ekonomi menghadapi tekanan ekonomi dari negara tetangganya. Pada aspek ekonomi, menurut pakar kebijakan pertahanan Qatar, Brahim Saïdy (2018) menyebutkan ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Qatar sebagai *small state*, antara lain: (1) pasar domestik yang kecil; (2) memiliki ketergantungan yang tinggi pada pasar asing untuk kegiatan ekspor-impor; (3) minimnya perkembangan industri alat berat; (4) tingkat spesialisasi dalam banyak varietas produk yang lemah; (5) lemahnya diversifikasi ekonomi; serta (6) memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor hidro-karbon. Dari keenam titik kelemahan ekonomi Qatar, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Qatar sekalipun dibangun oleh Emir Sheikh Tamim menggunakan strategi tiga jalur pembangunan (investasi, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur) yang impresif dan berhasil, tetap saja rentan melemah (*vulnerable*) apabila terjadi instabilitas politik eksternal yang mempengaruhi ‘pasar’-nya di negara luar.

Perubahan hubungan diplomatik antara Qatar-Iran yang meningkat di segala bidang, merupakan hasil dari kalkulasi hitung-rugi Pemerintah Qatar yang mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi. Jika ditarik pada sikap Iran yang mengetahui Qatar mengalami krisis diplomatik, Pemerintahan Hassan Rouhani secara kooperatif membantu perekonomian Qatar dengan menawarkan diri menggantikan peran sejumlah negara GCC untuk memasok kebutuhan sehari-hari rakyat Qatar, termasuk membuka wilayah udara dan perairannya sebagai rute baru maskapai penerbangan Qatar serta jalur lintasan kapal berbendera Qatar. Pemerintah Qatar tentu memanfaatkan peluang besar ini untuk menyelamatkan perekonomiannya, yakni menemukan rute perdagangan baru lewat Iran. Secara keseluruhan, mengacu pada angka yang dikeluarkan oleh Islamic Republic of Iran Customs Administration

(2017) menunjukkan bahwa Iran telah mengekspor produk non-minyak senilai US\$ 139 juta ke Qatar selama tujuh bulan (22 Maret-22 Oktober), naik signifikan sebesar 117,5 persen dibandingkan tahun 2016 (Press TV, 2017).

Bentuk kerjasama baru hasil dari peningkatan hubungan diplomatik Qatar-Iran kemudian diwujudkan pada penandatanganan perjanjian trilateral bersama Turki pada 27 November 2017 di Teheran. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dengan Qatar di tengah blokade yang dipimpin oleh Arab Saudi di Teluk (Press TV, 2017). Penguatan kerjasama memperkuat posisi Iran yang tidak sekedar mitra perdagangan minyak dan gas, namun menggantikan posisi negara-negara GCC sebagai pasar impor baru. Potensi yang ada pada Iran ialah yang dibutuhkan oleh Qatar. Iran mampu memenuhi kebutuhan pangan dan infrastruktur. Mengingat, Qatar membutuhkan banyak bahan baku untuk pembangunan berbagai mega proyek infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk diproduksi sendiri. Di sektor perhubungan udara, Qatar menjalin kerjasama dengan otoritas Iran untuk meningkatkan kuantitas penerbangan antar dua wilayah. pada tahun 2019 maskapai Qatar Airways meningkatkan jumlah penerbangan hingga mencapai 20 penerbangan langsung non-stop setiap minggunya dari Doha, meningkat 2 kali lipat dari biasanya (Qatar Airways, 2018). Peluncuran program terbaru layanan Qatar Airways cukup memberikan bukti komitmen Pemerintah Qatar memperluas jaringan di pasar yang berkembang (Iran). Dapat disimpulkan di sini, jarak yang relatif dekat dan tidak ada konflik politik antara Qatar-Iran, memberikan porsi keuntungan bagi perekonomian Qatar untuk tetap stabil dan tumbuh.

Secara politis, meningkatkan hubungan diplomatik dengan Iran di tengah krisis yang sedang berlangsung merupakan keputusan yang tidak biasa. Hal ini tidak terlepas dari kepribadian Emir Sheikh Tamim yang tegas dan emosional yang melihat upaya Arab Saudi dan sekutunya ingin memperlemah kedaulatan negara dan kedudukannya. Qatar melakukan perlawanan untuk memperlemah kekuatan Arab Saudi secara politik dengan mengimbangi kekuatan Arab Saudi yang berusaha mengisolasi Iran. *Balancing* yang dimaksud ialah, kepemilikan kapabilitas militer Qatar yang menjalin kerjasama militer dengan Amerika Serikat menyediakan pangkalan militer di Al Udeid, memberikan nilai tawar Qatar terhadap Pemerintah Arab Saudi. Sederhananya, Qatar berhasil memperlemah agresifitas Arab Saudi dengan merestorasi hubungan diplomatik terhadap Iran. Hasil yang diperoleh ialah kepercayaan Qatar untuk kembali menjalankan prinsip kebijakan luar negeri yang independen.

Mengintensifkan hubungan diplomatik dengan Iran, memperlihatkan Pemerintah Qatar sedang mengekspresikan diri menggunakan kebijakan luar negeri yang independen. Perubahan hubungan diplomatik Qatar-Iran sekaligus menunjukkan sikap Qatar menjauhi ‘teman lama’-nya, terutama Arab Saudi. Menurut Hassan Hassan (2015), dari perspektif Qatar sendiri, Doha tengah berupaya mempertahankan kebijakan luar negeri independen, tetapi tidak serta merta bertujuan untuk mengganggu kepentingan negara tertentu di GCC, namun juga tidak terkait GCC. Jika Qatar memilih untuk tidak menerima tawaran Arab Saudi, maka Qatar kehilangan berbagai kerjasama strategis termasuk di dalamnya bidang keamanan. Sudah jelas bahwa Qatar tidak lagi berpihak kepada Arab Saudi dan memilih untuk menjalin hubungan dekat dengan Iran. Namun, di balik kemajuan hubungan politik Qatar-Iran, ada pertimbangan pertahanan-keamanan yang memperhatikan realitas geografis Qatar sebagai negara kecil. Brahim Saïdy (2018), menyebutkan bahaya datangnya ancaman di lingkungan eksternal terhadap survivalitas negara kecil pasti ada. tidak mungkin bagi Qatar dalam konteks konflik Timur Tengah dan konstelasi politik Arab Saudi-Iran memilih tetap netral. Jika diambil, maka Qatar tidak memperoleh jaminan stabilitas keamanan apabila terjadi agresi militer di wilayahnya.

Untuk itu, motivasi kebijakan luar negeri Qatar didorong oleh strategi pertahanan diri dan strategi perlindungan, bukan netralitas (Saïdy, 2018). Strategi pertahanan diri dan perlindungan, Pemerintah Qatar melihat proporsional kapabilitas militer dari Iran dan Arab Saudi. Keputusan untuk memilih salah satu pihak didasari oleh kekuatan militer. Secara umum, kapabilitas militer Iran mampu menyaingi kekuatan militer yang dimiliki oleh Arab Saudi. Peluang inilah yang dibaca oleh elit Qatar, bahwa meningkatkan hubungan diplomatik meminimalisasi Qatar memperoleh ancaman agresi militer dari aktor luar. Qatar mendapat jaminan keamanan, karena tidak memungkinkan bagi Arab Saudi dan sekutunya akan melakukan serangan terhadap Qatar. Keuntungan politik semacam ini sejalan dengan pemikiran Kamrava (2017) yang menyebut Iran sebagai implementasi strategi *hedging* guna memperoleh stabilitas keamanan di kawasan Teluk yang dinamis.

## **Kesimpulan**

Krisis diplomatik yang dialami Qatar memberikan pemahaman bahwa Qatar tidak ingin menggantungkan diri secara keseluruhan kepada tiga negara yang memusuhinya. Otomatis Qatar yang terjerat gejala ekonomi di beberapa sektor harus segera mencari jalan keluar. Sehingga, alasan yang kedua ialah keputusan meningkatkan hubungan diplomatik dengan

Iran merupakan pilihan rasional yang mempertimbangkan *benefit* atau keuntungan optimal yang diterima Qatar. Persepsi Emir Sheikh Tamim masih berpengaruh dalam intensitas hubungan politik Qatar-Iran yang semakin kuat, ketika kedua kepala negara saling berkomunikasi dan menyatakan apresiasinya. Dengan demikian, Pemerintah Qatar yang menghapus pandangan diskriminatif terhadap Iran, berharap mampu menjalin hubungan kerjasama untuk mengalihkan pasar impor bahan pokok yang berpusat di sejumlah negara GCC, dapat digantikan oleh Iran. Dari analisis di atas memperjelas temuan bahwa Pemerintah Qatar di bawah kepemimpinan Emir Sheikh Tamim tidak mengintensifkan diri untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan sejumlah negara GCC dan memilih untuk merestorasi penuh hubungan diplomatik dengan Iran, didasari (1) adanya kontribusi persepsi Emir Sheikh Tamim yang melihat tekanan sejumlah negara GCC dalam Krisis Diplomatik GCC tahun 2017 merupakan bentuk pelemahan atas kedaulatan negara; serta (2) di samping itu, restorasi penuh hubungan diplomatik dengan Iran merupakan pilihan rasional Pemerintah Qatar untuk menyelamatkan kondisi perekonomiannya dari imbas kebijakan blokade ekonomi dan mempertahankan independensi kebijakan luar negerinya terhadap dominasi pengaruh Arab Saudi.

## Daftar Pustaka

- Al Jazeera. "Qatari emir: Our sovereignty is a red line". <https://www.aljazeera.com/news/2017/10/qatar-emir-blockading-countries-regime-change-171029194842654.html>. (Diakses [online] pada 14 Januari 2019).
- BBC Indonesia. "Tujuh Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik: Ada Apa dengan Qatar?". [www.bbc.com/indonesia/dunia-40157225](http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40157225). (Diakses [online] pada 24 Oktober 2018).
- Bianco, Cinzia. "The Intra-GCC Crisis: Domestic, Regional and International Layers". Roma: Instituto Affari Internazionali. (2017).
- Briguglio, Lino et al. "Conceptualizing and Measuring Economic Resilience". Malta: University of Malta. (2006).
- Coface Publication Embargo. "Embargo on Qatar: Manageable for the time being, but not perennially". Bois-Colombes: Coface Country Risk and Economic Studies Department. (2017).
- Comanescu, Lazar. "The Link between Economics, Security and Stability: the Case of SouthEastern Europe", (paper prepared for NATO Economics Colloquium on Economic Developments and Reforms in Co-operation Partners Countries: The Link between Economics, Security and Stability, NATO Headquarters, Brussels). (1999).
- Hassan, Islam Khalid. *GCC's 2014 Crisis: Causes, Issues and Solutions*. Doha: Georgetown University of Foreign Service of Qatar. 2015
- Kamrava, Mehran. "Iran-Qatar Relations." *Securities Between Bilateral Issues Between Iran and Its Arab Neighbours*. Doha: Center for International and Regional Studies, Georgetown University. 2017.
- Mingst, Karen A. *Essentials of International Relations*. Kentucky: WW. Norton. 1999.
- Ministry of Foreign Affairs Qatar. "Qatar Announces Return of Its Ambassador to Tehran". [www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2017/08/23/qatar-announces-return-of-its-ambassador-to-tehran](http://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2017/08/23/qatar-announces-return-of-its-ambassador-to-tehran). (Diakses [online] pada 12 Januari 2019).
- Observatory of Economic Complexity. "What does Qatar import from Saudi Arabia?", Massachusetts of Technology. [http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree\\_map/hs92/import/qat/sau/show/2015/](http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/qat/sau/show/2015/). (Diakses [online] pada 18 Februari 2019).
- Policy Analisis Unit. "The Crisis in Gulf Relations: Old Rivalries, New Ambitions". Doha: Arab Center for Research and Policy Studies. (2017).
- Press TV. "Iran, Turkey, Qatar Move to Bolster Trade Amid Saudi-led Blockade". [www.presstv.com/detail/2017/11/27/543605/URL-iran-qatar-turkey-saudi-blockade-deal](http://www.presstv.com/detail/2017/11/27/543605/URL-iran-qatar-turkey-saudi-blockade-deal). (Diakses [online] pada 26 Februari 2019).
- Pullella, Philip. "Qatar says Arab states' demands 'made to be rejected', says open to talks", *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-idUSKBN19M3NS>. (Diakses [online] pada 05 Maret 2019).
- Qatar Tourism report, Q4 2017, BMI Research.
- Qatar Tribune. "Despite blockade, Qatar secured new trade routes & bonded together in unity. Qatar emerged stronger". <http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/112206>. (Diakses [online] pada 26 Februari 2019).
- Saidy, Brahim. "Qatar's Defense Policy: Smart Choices of A Small State. Doha: Qatar University". Pp. 4. (This paper presented at the conference: "Small States and the New Security



- Environment (SSANSE)", Institute of International Affairs and the Centre for Small State Studies, University of Iceland, Reykjavik, Iceland, June 26, 2018). (2018).
- Schacter, Daniel. *Psychology*. Worth Publishers. 2011.
- Snelbecker, David. "Prospects for Economic Security and Growth in Ukraine", (paper prepared for NATO Economics Colloquium on Economic Developments and Reforms in Co-operation Partners Countries: The Link between Economics, Security and Stability, NATO Headquarters, Brussels, 1999). (1999).
- Sulaib, Faisal Mukhyat Abu. 2017. "Understanding Qatar's Foreign Policy 1995-2017". [www.mepc.org/journal/understanding-qatars-foreign-policy-1995-2017](http://www.mepc.org/journal/understanding-qatars-foreign-policy-1995-2017). (Diakses [online] pada 06 Februari 2019).
- Tempo. "Arab Saudi Bangun Kanal untuk Memisahkan Perbatasan Darat Qatar". <https://dunia.tempo.co/read/1099419/arab-saudi-bangun-kanal-untuk-memisahkan-perbatasan-darat-qatar>. (Diakses [online] pada 13 Januari 2019).
- The Peninsula Qatar. "A Speech that Makes Us Immensely Proud". <https://www.thepeninsulaqatar.com/editorInChief/22/07/2017/A-speech-that-makes-us-immensely-proud>. (Diakses [online] pada 13 Maret 2019).
- The Strait Times. "Qatar Emir Accuses Blockade Countries of Wanting 'Regime Change'". [www.straittimes.com/world/middle-east/qatar-emir-accuses-blockade-countries-of-wanting-regime-change](http://www.straittimes.com/world/middle-east/qatar-emir-accuses-blockade-countries-of-wanting-regime-change). (Diakses [online] pada 04 Februari 2019).
- Toumi, Habib. "Qatar Recalls Ambassador to Iran". [www.gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-recalls-ambassador-to-iran-1.1649619](http://www.gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-recalls-ambassador-to-iran-1.1649619). (Diakses [online] pada 19 September 2018).
- World Integrated Trade Solutions. "Qatar Food Product Exports by Country and Region 2015". <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/Total>. Diakses [online] pada 04 Maret 2019.
- \_\_\_\_\_. "Qatar Food Product Exports by Country and Region 2016". Diakses [online] pada 04 Maret 2019, melalui <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/Total>.
- \_\_\_\_\_. "Qatar Food Product Imports by Country and Region 2015". [https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2015/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/16-24\\_FoodProd](https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2015/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/16-24_FoodProd). (Diakses [online] pada 04 Maret 2019).
- \_\_\_\_\_. "Qatar Food Product Imports by Country and Region 2016". [https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2016/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/16-24\\_FoodProd](https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2016/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/16-24_FoodProd). (Diakses [online] pada 04 Maret 2019).